

MODEL ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DOMAIN PROSES BISNIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

Gede Sudanta Nethan Kuru¹⁾, Soni Fajar Surya Gumilang²⁾, Ryan Adhitya Nugraha³⁾

^{1, 2, 3)}Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom

Jl. Telekomunikasi No 1, Bandung

e-mail: gsnethankuru@gmail.com¹⁾, mustonie@telkomuniversity.ac.id²⁾, ranugraha@telkomuniversity.ac.id³⁾

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari sangat pesat sehingga dapat meningkatkan produktivitas suatu individu maupun organisasi. Sektor Pemerintahan juga memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya peningkatan penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien. Begitu juga dengan Pemerintah Indonesia, pada tahun 2018 mengeluarkan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan publik yang berkualitas. Evaluasi dan monitoring SPBE dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada setiap instansi pemerintah di Indonesia. Pada tahun 2019 hasil evaluasi SPBE di Pemda Kabupaten Kuningan memperoleh nilai 2.11 dengan indeks cukup. Untuk itu, penelitian ini berfokus pada peningkatan tata kelola SPBE yang termasuk di dalamnya yaitu standarisasi dan integrasi proses bisnis SPBE Pemda Kabupaten Kuningan. Peneliti memberikan solusi berupa rancangan desain enterprise architecture SPBE di domain proses bisnis sesuai dengan arsitektur SPBE dan disesuaikan menggunakan metode TOGAF ADM. Beberapa fase yang digunakan yaitu preliminary phase, architecture vision, dan arsitektur proses bisnis. Fase utama pada perancangan ini yaitu arsitektur proses bisnis yang menghasilkan peta proses bisnis level 0, peta proses bisnis level 1, dan peta lintas fungsi sebagai standarisasi proses bisnis SPBE sesuai PermenPANRB No. 19 tahun 2018.

Kata Kunci: Arsitektur Proses Bisnis, Enterprise Architecture, Kabupaten Kuningan, SPBE, TOGAF ADM.

ABSTRACT

The development of information technology in everyday life is very rapid so it can increase the productivity of an individual and an organization. The government sector also utilizes information technology to improve the provision of effective and efficient public services. Likewise with the Government of Indonesia, in 2018 issued Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning the Electronic-Based Government System (SPBE) as a guideline for governance that utilizes information and communication technology to provide quality public services. SPBE evaluation and monitoring is carried out by the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (KemenPANRB) in every government agency in Indonesia. In 2019 the results of the SPBE evaluation at the Kuningan Regency Government obtained a score of 2.11 with a sufficient index. For this reason, this research focuses on improving the governance of SPBE, which includes standardization and integration of SPBE business processes in the Kuningan Regency Government. The researcher provides a solution in the form of the SPBE enterprise architecture design in the business processes domain according to the SPBE architecture and adapted using the TOGAF ADM method. Some of the phases used are the preliminary phase, the architectural vision, and the business architecture process. The main phase in this design is a business process architecture that produces a level 0 business process map, a level 1 business process map, and a cross-functional map as a standardization of SPBE business processes according to PermenPANRB No. 19 years 2018.

Keywords: Business Process Architecture, Enterprise Architecture, Kuningan Regency, SPBE, TOGAF ADM.

I. PENDAHULUAN

PERKEMBANGAN teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kehidupan sehari-hari berkembang sangat pesat sehingga memudahkan dalam mencari, mempelajari dan mendapatkan informasi [1]. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan produktivitas suatu organisasi maupun individu [2]. Salah satu organisasi yang memanfaatkan TIK yaitu instansi pemerintah dalam hal penyediaan pelayanan publik yang baik [3]. Pemanfaatan *E-government* salah satu bentuk peningkatan pelayanan masyarakat yang diharapkan bisa meningkatkan efisiensi proses birokrasi [4].

Berdasarkan hasil survei *E-government Development Index* (EGDI) tahun 2020 oleh *United Nations*, Indonesia mendapat poin 0.6612 dan berada pada peringkat 88 dari 193 negara di dunia. Di wilayah Asia Tenggara, Indonesia berada di atas negara Cambodia [5]. Dapat dilihat peringkat EGDI wilayah Asia Tenggara di tahun 2020 pada Tabel I. Peringkat EGDI Asia Tenggara.

TABEL I.
PERINGKAT EGDI ASIA TENGGARA (*UNITED NATIONS, 2020*)

No	Negara	Poin Indeks	Peringkat
1	Singapore	0.915	11
2	Malaysia	0.7892	47
3	Thailand	0.7565	57
4	Brunei Darussalam	0.7389	60
5	Philippines	0.6892	77
6	Vietnam	0.6667	86
7	Indonesia	0.6612	88
8	Cambodia	0.5113	124
9	Timor Leste	0.4649	134
10	Myanmar	0.4316	146
11	Laos	0.3288	167

Pemerintah Indonesia ada tahun 2018 Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan pada cakupan nasional, instansi pusat, dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya [6]. Melalui Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan SPBE di setiap instansi pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan tujuannya perlu dilakukan evaluasi secara berkala [7].

Hasil evaluasi pelaksanaan SPBE pada tahun 2019 oleh Kemen PANRB, Pemda Kabupaten Kuningan mendapat nilai indeks SPBE 2.11 dengan predikat SPBE yaitu cukup [8]. Salah satu nilai terkecil evaluasi SPBE Pemda Kabupaten Kuningan yaitu pada domain tata kelola SPBE. Sesuai dengan Perpres No. 95 tahun 2018 tentang SPBE untuk mewujudkan tata kelola SPBE yang terpadu antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu adanya transformasi mendasar pada pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan SPBE [6]. Sehubungan dengan hal itu, Pemda Kabupaten Kuningan perlu meningkatkan kembali indeks SPBE dengan melakukan optimalisasi teknologi informasi serta standarisasi dan integrasi proses bisnis.

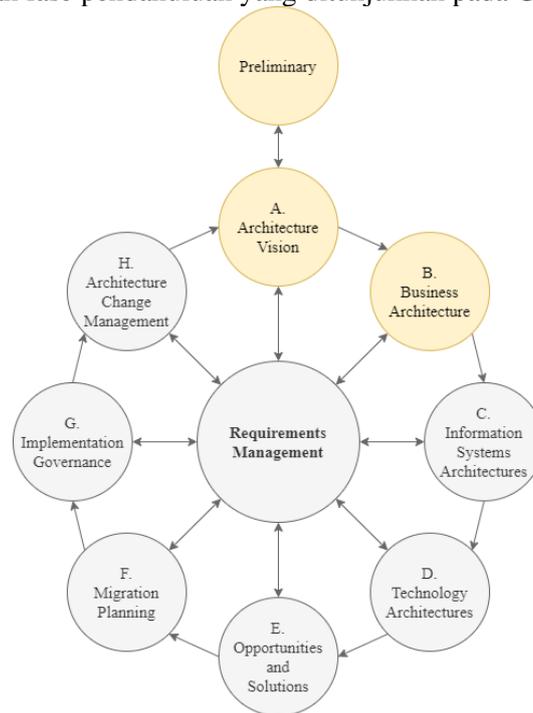
Dengan kondisi Pemda Kabupaten Kuningan di atas, dibutuhkan perancangan sistem informasi dari berbagai aspek seperti, arsitektur bisnis organisasi, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi agar tercapai layanan SPBE yang terintegrasi [9]. Perancangan yang dibutuhkan yaitu *enterprise architecture* (EA) dalam penggambaran model arsitektur SPBE. *Enterprise architecture* merupakan kumpulan metode dan prinsip yang dapat mewujudkan keselarasan bisnis dengan teknologi informasi suatu organisasi [10]. Sedangkan arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar dalam melaksanakan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi hingga keamanan untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi [6]. Terdapat enam domain arsitektur SPBE yaitu domain proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan.

Pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penggambaran arsitektur EA di domain proses bisnis SPBE Pemda Kabupaten Kuningan dengan menerapkan model arsitektur SPBE dan metode TOGAF ADM (*Architecture Development Method*). Penyusunan proses bisnis SPBE mengacu kepada PermenPANRB No. 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis. TOGAF ADM merupakan metode pengembangan EA yang umum dan bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi serta dapat digabungkan dengan kerangka kerja lain untuk menghasilkan arsitektur yang spesifik [11]. TOGAF ADM membentuk siklus proses iterative yang terdiri dari beberapa fase, diantaranya *Preliminary phase*, *Phase A: Architecture Vision*, *Phase B: Business Architecture*, *Phase C: Information System Architecture*, *Phase D: Technology Architecture*, *Phase E: Opportunities and Solution*, *Phase F: Migration Planning*, *Phase G: Implementation Governance*, *Phase H: Architecture Change Management*, dan *Requirements Management* [12]. Berdasarkan uraian di atas, perancangan EA pada penelitian ini berdasarkan arsitektur SPBE disesuaikan dengan metode TOGAF ADM untuk menggambarkan model arsitektur yang berfokus di domain proses bisnis pada Pemda Kabupaten Kuningan. Keluaran perancangan model arsitektur proses bisnis SPBE ini yaitu berupa peta proses bisnis level 0, peta proses bisnis level 1, dan peta lintas fungsi yang diidentifikasi berdasarkan kondisi RPJMD Pemda Kabupaten Kuningan tahun 2018-2023.

II. METODE PENELITIAN

Perancangan *enterprise architecture* pada penelitian ini menggunakan acuan berdasarkan arsitektur SPBE pada Perpres No. 95 tahun 2018 yang disesuaikan dengan metode TOGAF ADM. *Enterprise Architecture* dapat menghasilkan cetak biru untuk mengintegrasikan strategi bisnis organisasi dengan sistem informasi dan teknologi. Penelitian ini menggunakan TOGAF ADM karena memiliki model arsitektur yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi dan digabungkan dengan kerangka kerja lain yaitu arsitektur SPBE. TOGAF ADM memiliki

8 (delapan) fase utama dan sebuah fase pendahuluan yang ditunjukkan pada Gambar 1.



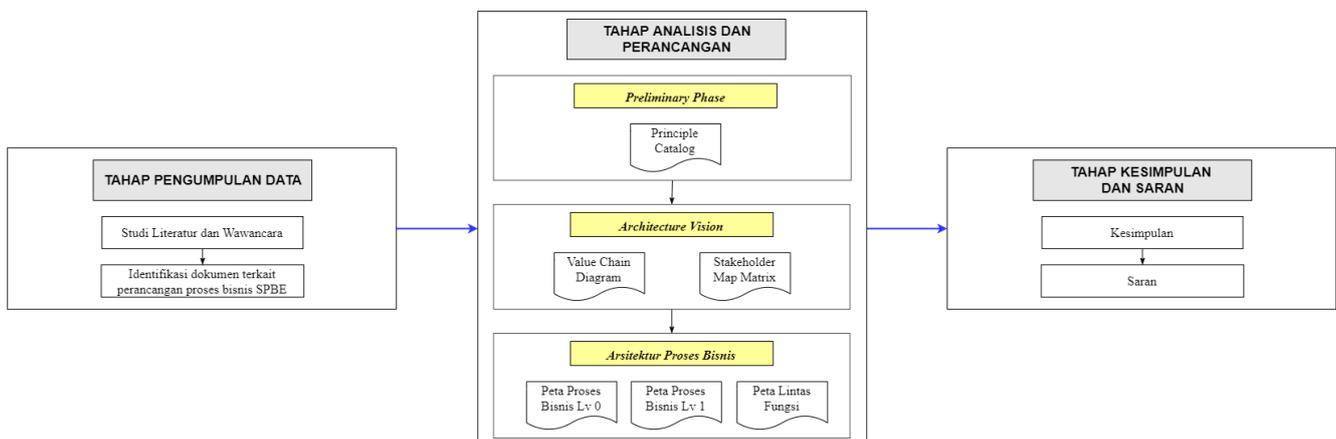
Keterangan: Tahapan yang digunakan dalam penelitian

Gambar 1. TOGAF ADM

Fase-fase TOGAF ADM menggambarkan siklus yang dapat diulang untuk mengembangkan EA. Fase TOGAF yang digunakan pada penelitian ini dimulai dari *preliminary phase*, *architecture vision*, dan *business architecture* yang disesuaikan dengan arsitektur SPBE menjadi arsitektur proses bisnis. Deskripsi dari tiap fase utama yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. *Preliminary phase*, merupakan fase inisiasi kebutuhan bisnis organisasi serta prinsip-prinsip arsitektur sesuai dengan arahan organisasi.
2. *Architecture vision*, merupakan fase awal untuk menggambarkan ruang lingkup pengembangan arsitektur, mengidentifikasi *stakeholders*, serta nilai-nilai utama untuk mencapai visi misi organisasi.
3. Arsitektur proses bisnis, merupakan fase utama dalam pemodelan strategi bisnis organisasi, dalam SPBE ini melalui pendefinisian dan penyusunan peta proses bisnis.

Tahapan dalam penelitian perancangan EA SPBE di domain proses bisnis pada Pemda Kabupaten Kuningan ini terdiri dari tiga tahapan, meliputi tahap pengumpulan data, tahap analisis dan perancangan, dan tahap penulisan kesimpulan dan saran. Secara lebih jelas ditunjukkan pada Gambar 2. Metode Penelitian.



Gambar 2. Metode Penelitian

Tahap awal pada penelitian ini yaitu tahap pengumpulan data. Pada tahap ini bertujuan untuk menjelaskan teknik pengumpulan data penelitian terhadap perancangan EA SPBE. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan studi literatur. Langkah awal pada tahap ini yaitu pengenalan terhadap objek penelitian dan pengenalan terhadap konsep SPBE. Selanjutnya melakukan wawancara kepada narasumber dari Pemda Kabupaten Kuningan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan mengetahui kondisi eksisting Kabupaten Kuningan. Selanjutnya yaitu melakukan studi literatur dengan mempelajari beberapa dokumen peraturan perundangan yang berkaitan dengan SPBE dan proses bisnis, yaitu Perpres No. 95 tahun 2018, RPJMD tahun 2018-2023, PermenPANRB No. 19 tahun 2018 serta mempelajari jurnal-jurnal ilmiah yang relevan terhadap EA SPBE.

Tahap kedua pada penelitian ini yaitu tahap analisis dan perancangan. Deskripsi langkah-langkah pada tahap kedua ini yaitu sebagai berikut:

1. Langkah awal pada tahap ini yaitu *preliminary phase* dengan melakukan identifikasi prinsip-prinsip proses bisnis dari TOGAF yang disesuaikan dengan visi misi Kabupaten Kuningan untuk menghasilkan artefak *principle catalog*.
2. Selanjutnya pada *architecture vision* melakukan identifikasi nilai-nilai proses utama dan pendukung Pemda Kabupaten Kuningan untuk menghasilkan artefak *value chain diagram*. Melakukan identifikasi terhadap *stakeholder* yang berkaitan dan memiliki kepentingan dalam pengembangan SPBE yang digambarkan dalam *stakeholder map matrix*.
3. Selanjutnya pada arsitektur proses bisnis melakukan identifikasi terhadap visi misi, tujuan, sasaran strategis, dan program prioritas pada RPJMD tahun 2018-2023 yang menghasilkan artefak peta proses bisnis level 0 dan 1 serta peta lintas fungsi. Penyusunan peta proses bisnis menggunakan tingkatan level agar memudahkan dalam penggambaran. Peta proses bisnis level 0 merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang merupakan turunan langsung dari visi, misi dan tujuan di dalam dokumen rencana strategis. Peta proses bisnis level 1 merupakan penjabaran yang lebih rinci dari peta proses bisnis level 0, yang dapat diidentifikasi dari program pembangunan daerah dari tujuan atau sasaran strategis pemerintah. Sedangkan peta lintas fungsi berfungsi untuk menggambarkan rangkaian kerja lintas unit, dapat diidentifikasi dari kegiatan kerja dari masing-masing program pembangunan daerah. Penggambaran proses bisnis ini dimodelkan dengan BPMN (*Business Process Modeling Notation*). BPMN merupakan standar untuk memodelkan proses bisnis agar informasi dapat dipahami oleh semua pengguna bisnis dengan mudah [13].

Tahap terakhir pada penelitian ini yaitu tahap kesimpulan dan saran. Tahap ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesimpulan dari hasil perancangan EA SPBE di domain proses bisnis pada Pemda Kabupaten Kuningan dan menghasilkan saran untuk dapat digunakan sebagai perbaikan pada penelitian berikutnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Preliminary Phase

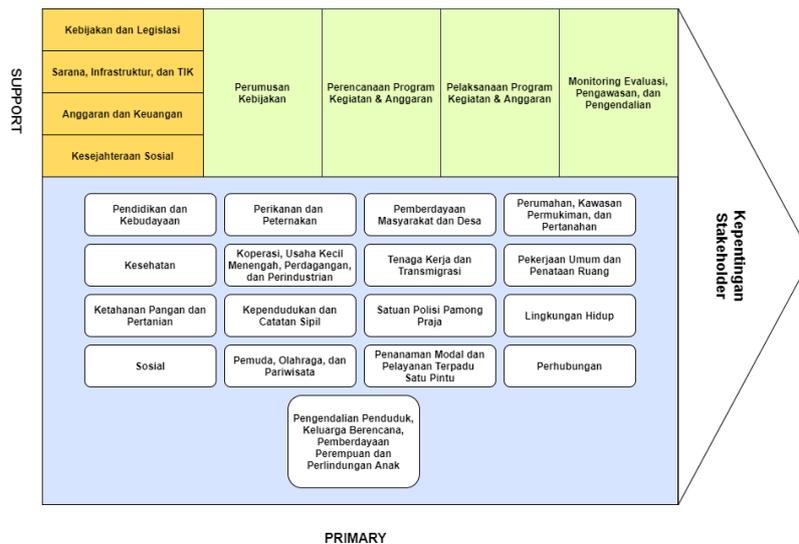
Preliminary phase merupakan tahap awal dari perancangan EA. Pada fase ini menjelaskan penentuan ruang lingkup dan prinsip-prinsip EA yang digunakan pada Pemda Kabupaten Kuningan [10][14]. Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu perancangan EA SPBE arsitektur domain proses bisnis dari level 0 dan 1 hingga peta lintas fungsi yang menjelaskan mengenai pelayanan kesehatan dan sosial. Prinsip arsitektur domain proses bisnis digunakan sebagai acuan untuk perancangan selanjutnya dilihat pada Tabel II. *Principle Catalog*.

TABEL II.
PRINCIPLE CATALOG

No	Prinsip Bisnis	Deskripsi
1	<i>Primacy of Principles</i>	Prinsip-prinsip manajemen TI dan SPBE akan berlaku untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemda Kabupaten Kuningan
2	<i>Information Management is Everybody's Business</i>	Seluruh SKPD berpartisipasi dan selaras dalam keputusan manajemen informasi yang diperlukan untuk mendukung layanan pemerintah dan SPBE
3	<i>Common Use Applications</i>	Pengembangan aplikasi yang digunakan di seluruh Pemda lebih disukai daripada pengembangan aplikasi serupa atau duplikasi yang hanya disediakan untuk SKPD tertentu
4	<i>IT Responsibility</i>	Diskominfo bertanggung jawab atas implementasi dan infrastruktur TI yang dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan layanan pemerintah
5	<i>Compliance with Law</i>	Setiap proses manajemen data dan informasi yang dijalankan oleh SKPD di lingkungan Pemda Kabupaten Kuningan harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap semua hukum, undang-undang, kebijakan, dan peraturan yang ada.
6	<i>Inovation</i>	Pemda Kabupaten Kuningan dapat melakukan penelitian terstruktur dan mencari cara inovatif menggunakan teknologi untuk mendukung layanan pemerintah berbasis elektronik.

B. Architecture Vision

Fase *architecture vision* merupakan fase pertama di dalam siklus TOGAF ADM yang bertujuan untuk mendefinisikan visi misi, aktivitas utama dan pendukung, serta hubungan *stakeholder* Pemda Kabupaten Kuningan [15]. Artefak keluaran pada fase ini yaitu *value chain diagram* dan *stakeholder map matrix*. Pada Gambar 3. *Value Chain Diagram* mendefinisikan nilai aktivitas utama (*primary*) terdapat urusan pelayanan pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dan aktivitas pendukung (*support*) merupakan administrasi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan internal birokrasi Pemda Kabupaten Kuningan. *Stakeholder* yang terkait dijelaskan pada Tabel III. *Stakeholder Map Matrix*.



Gambar 3. *Value Chain Diagram*

TABEL III.
STAKEHOLDER MAP MATRIX

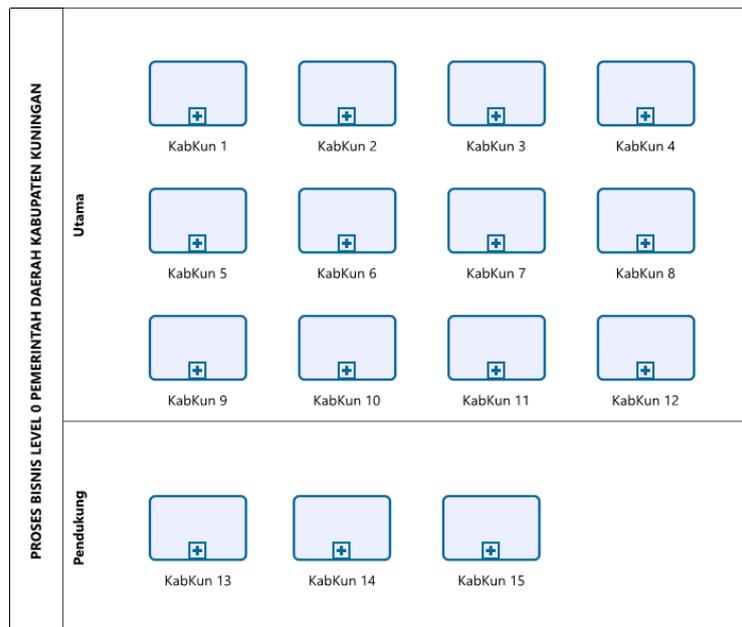
No.	Stakeholder	Role	Class
1	Bupati	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPBE di Pemda Kabupaten Kuningan	Key Player
2	Sekretariat Daerah	Mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE Pemda Kabupaten Kuningan serta mengoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan Pemda lain	Key Player
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	Mengoordinasikan pengelolaan arsitektur SPBE, mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur TIK, serta melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan	Keep Informed
4	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Mengoordinasikan integrasi proses bisnis Pemda Kabupaten Kuningan	Keep Informed
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Mengoordinasikan perencanaan SPBE serta mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data	Keep Informed
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Mengoordinasikan penganggaran SPBE Pemda Kabupaten Kuningan	Keep Informed

C. Arsitektur Proses Bisnis

Fase arsitektur proses bisnis merupakan tahapan utama dalam perancangan EA ini. Model perancangan arsitektur proses bisnis ini mengacu pada amanah Perpres No. 95 tahun 2018 serta PermenPANRB No.19 tahun 2018. Tujuan penyusunan peta proses bisnis yaitu agar setiap instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien; mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan [16]. Artefak yang dihasilkan dari tahap ini yaitu peta proses bisnis level 0, peta proses bisnis level 1, dan peta lintas fungsi dengan contoh penggambaran pada bidang kesehatan dan bidang sosial Pemda Kabupaten Kuningan.

Peta proses bisnis level 0 memuat penggambaran keseluruhan proses untuk mencapai visi misi Pemda Kabupaten Kuningan yang diidentifikasi berdasarkan sasaran strategis di dalam RPJMD tahun 2018-2023. Terdapat 15 proses

yang digambarkan dalam peta proses bisnis level 0 dan dinamakan menggunakan kode proses yaitu KabKun (Kabupaten Kuningan). Masing-masing proses tersebut merupakan sasaran dari Pemda Kabupaten Kuningan. Terdapat dua tipe proses yaitu proses utama dan proses pendukung. Proses utama merupakan proses yang berperan langsung memenuhi kebutuhan pengguna eksternal maupun internal dan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pemerintahan dalam pencapaian visi misi. Sedangkan proses pendukung merupakan proses untuk mendukung pengguna internal dalam pengelolaan operasional dan administrasi pemerintahan. Pada Gambar 4. berikut menggambarkan peta proses bisnis level 0 Pemda Kabupaten Kuningan.



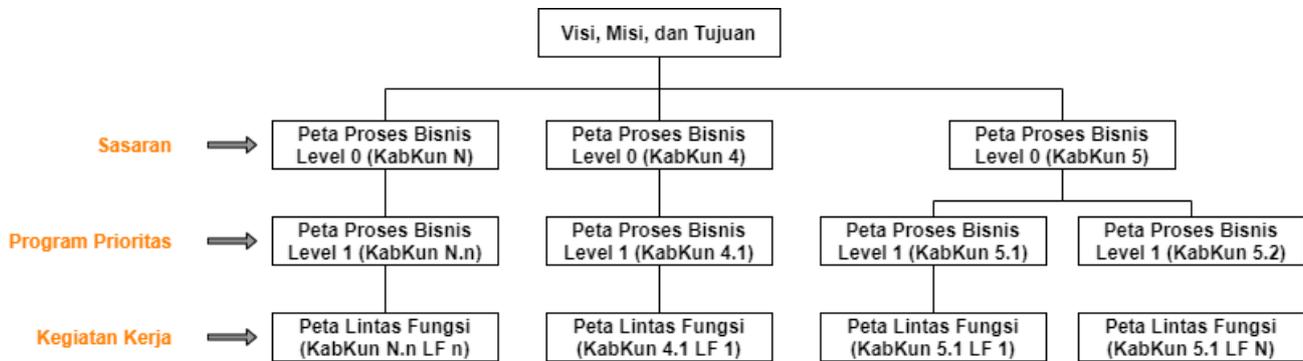
Gambar 4. Peta Proses Bisnis Level 0

Penjelasan deskripsi masing-masing proses dari peta proses bisnis level 0 Pemda Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini.

TABEL IV.
DESKRIPSI PROSES BISNIS LEVEL 0

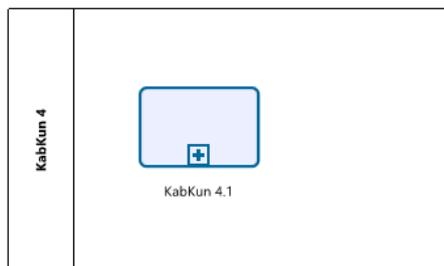
Kode Proses	Nama Proses	Tipe Proses
KabKun 1	Penyelenggaraan mutu pelayanan publik yang baik dan partisipasi publik	Utama
KabKun 2	Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, serta kehidupan masyarakat yang agamis berbasis kearifan lokal seni dan budaya	Utama
KabKun 3	Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan	Utama
KabKun 4	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Utama
KabKun 5	Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan	Utama
KabKun 6	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Utama
KabKun 7	Peningkatan pengarus utamaan gender	Utama
KabKun 8	Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	Utama
KabKun 9	Terbangunnya desa unggul berdasarkan karakteristik lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Utama
KabKun 10	Terwujudnya daya dukung investasi bagi pembangunan desa yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja serta pemberdayaan masyarakat desa	Utama
KabKun 11	Peningkatan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	Utama
KabKun 12	Pengelolaan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Utama
KabKun 13	Tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Pendukung
KabKun 14	Peningkatan kecepatan dan ketepatan pengelolaan data dan informasi publik	Pendukung
KabKun 15	Peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan asli dan keuangan daerah	Pendukung

Peta proses bisnis level 1 merupakan model peta proses bisnis yang digambarkan menggunakan notasi sub-proses BPMN sebagai penggambaran lebih rinci dari masing-masing proses di proses bisnis level 0. Proses bisnis level 1 diidentifikasi berdasarkan program prioritas pembangunan daerah tahun 2021-2023 yang terdapat di RPJMD tahun 2018-2023. Hirarki pemetaan proses bisnis dari level 0 ke level 1 dan peta lintas dijelaskan melalui Gambar 5. Hirarki Pemetaan Proses Bisnis berikut.

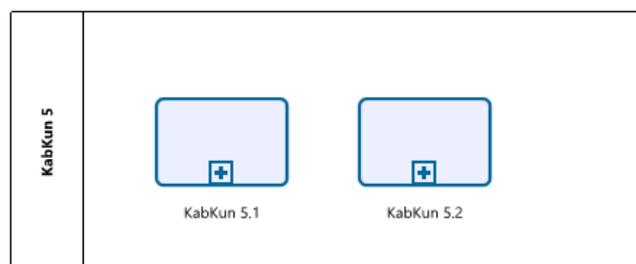


Gambar 5. Hirarki Pemetaan Proses Bisnis

Hirarki pemetaan proses bisnis di atas menjelaskan proses identifikasi dan penurunan proses dari level 0 ke level 1 hingga peta lintas fungsi. Pada Gambar V. hanya menyajikan contoh penggambaran model peta proses bisnis level 1 hingga lintas fungsi yaitu pada proses KabKun 4 di bidang kesehatan dan KabKun 5 di bidang sosial. Berikut merupakan model peta proses bisnis level 1 KabKun 4 dan peta proses bisnis level 1 KabKun 5.



Gambar 6. Peta Proses Bisnis Level 1 KabKun 4



Gambar 7. Peta Proses Bisnis Level 1 KabKun 5

Penjelasan deskripsi masing-masing proses dari peta proses bisnis level 1 KabKun 4 dan KabKun 5 Pemda Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada Tabel V berikut ini.

TABEL V.
 DESKRIPSI PROSES BISNIS LEVEL 1 KABKUN 4 DAN KABKUN 5

Proses Level 0		Proses Level 1	
KabKun 4	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	KabKun 4.1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
KabKun 5	Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan	KabKun 5.1	Program perlindungan dan jaminan sosial
		KabKun 5.2	Program pemberdayaan sosial

Penjelasan deskripsi masing-masing kegiatan dari peta lintas fungsi KabKun 4.1 dan KabKun 5.1 Pemda Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada Tabel VI berikut ini.

TABEL VI.
DESKRIPSI PETA LINTAS FUNGSI KABKUN 4.1 DAN KABKUN 5.1

Proses Level 1		Lintas Fungsi	
KabKun 4.1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	KabKun 4.1 LF 2	Kegiatan penyediaan bantuan Jampersal (Jaminan Persalinan) bagi Ibu hamil dan masyarakat kurang mampu
KabKun 5.1	Program perlindungan dan jaminan sosial	KabKun 5.1 LF 1	Kegiatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi masyarakat miskin

Pada Gambar 8 di atas merupakan peta lintas fungsi dari KabKun 4.1 LF 2 yaitu kegiatan penyediaan bantuan Jampersal (Jaminan Persalinan) bagi Ibu hamil dan masyarakat kurang mampu, yang terdapat pada program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk upaya memperkecil angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan pada masyarakat kurang mampu. Terdapat aktivitas target sebagai usulan untuk dilakukan standarisasi dan integrasi dengan aplikasi layanan publik dan rumah sakit di Kabupaten Kuningan.

Pada Gambar 9 di atas merupakan peta lintas fungsi KabKun 5.1 LF 1 yaitu kegiatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi masyarakat miskin, yang terdapat pada program perlindungan dan jaminan sosial. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan keakuratan data kesejahteraan sosial Pemda Kabupaten Kuningan.

IV. KESIMPULAN

Sesuai dengan proses penelitian perancangan *enterprise architecture* sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di domain proses bisnis pada Pemda Kabupaten Kuningan maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Hasil keluaran artefak dari *preliminary phase* menghasilkan *principle catalog* yang menjelaskan prinsip-prinsip utama proses bisnis Kabupaten Kuningan dalam pengembangan perancangan EA kedepannya.
2. Pada fase *architecture vision* menghasilkan *value chain diagram* yang menjelaskan nilai-nilai utama dan aktivitas dalam mencapai visi misi Pemda Kabupaten Kuningan serta menghasilkan *stakeholder map matrix* yang menjelaskan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan SPBE di Pemda Kabupaten Kuningan.
3. Pada fase arsitektur proses bisnis model perancangan dan pemetaan proses bisnis berdasarkan PermenPANRB No. 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Sehingga pada fase ini menghasilkan peta proses bisnis level 0 yang di dalamnya terdiri dari 15 proses (sasaran strategis) bertujuan untuk menjelaskan keseluruhan proses yang dijalankan untuk mencapai visi misi Kabupaten Kuningan. Pada peta proses bisnis level 1 dan peta lintas fungsi menggunakan contoh penggambaran melalui bidang kesehatan dan bidang sosial, jadi peta proses bisnis level 1 menjelaskan bentuk rinci dari proses bisnis level 0 yaitu bentuk rinci dari proses utama KabKun 4 bidang kesehatan dan KabKun 5 bidang sosial. Sedangkan pada peta lintas fungsi merupakan kegiatan yang menggambarkan alur kerja dan keterkaitan perangkat daerah dari program di proses bisnis level 1. Seluruh hasil penyusunan peta proses bisnis bertujuan dapat memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi dan layanan SPBE pada Kabupaten Kuningan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. H. Parsaorantua, Y. Pasoreh, and S. A. Rondonuwu, "Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Tentang Web E-Government Di Kominfo Kota Manado)," *Acta Diurna*, vol. VI, no. 3, pp. 1–14, 2017.
- [2] M. A. Machmudi, "Peran Teknologi Informasi dalam Usaha Meraih Kesempatan Masa Depan Organisasi," *J. Transform.*, vol. 15, no. 1, pp. 87–95, 2019, [Online]. Available: <https://ejournal.stmikbinapatria.ac.id/index.php/JT/article/view/187>.
- [3] R. H. Pratama, A. Hakim, and M. Shobaruddin, "Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Elektronik Rukun Tetangga/Rukun Warga (e-RT/RW) (Studi e-Government di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Pemerintah Kota Surabaya)," *J. Adm. Publik*, vol. 3, no. 12, pp. 2128–2132, 2015.
- [4] H. D. Pratiwi, W. H. N. Putra, and A. D. Herlambang, "Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," vol. 4, no. 11, pp. 4116–4124, 2020.

- [5] United Nations, “UN E-Government Knowledgebase,” 2020. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center>.
- [6] Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Jakarta, 2018.
- [7] KemenPANRB, “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” 2018, doi: 10.1088/1751-8113/44/8/085201.
- [8] KemenPANRB, “Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kuningan,” 2019. <https://spbe.go.id/moneval/detail/OTRjMDA4NDVmZWYzNjQxZWZh>.
- [9] D. Y. Handika, R. Mulyana, and N. Ambarsari, “Analisis Arsitektur Enterprise Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan Kerangka Kerja TOGAF ADM (Studi Kasus: Disparbud Kabupaten Bandung Barat),” *Syst. Inf. Syst. Informatics J.*, vol. 5, no. 1, pp. 48–54, 2019, doi: 10.29080/systemic.v5i1.634.
- [10] A. H. Fikri, W. Purnomo, and W. H. N. Putra, “Perancangan Enterprise Architecture Menggunakan TOGAF ADM pada PT. Hafintech Prima Mandiri,” *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 4, no. 7, pp. 2032–2042, 2020.
- [11] E. Nurmiati and S. Abdul Mughni Ashirotu, “Perencanaan Enterprise Architecture Menggunakan TOGAF Architecture,” *Appl. Inf. Syst. Manag.*, vol. 3, no. 1, pp. 59–68, 2020.
- [12] The Open Group, *The TOGAF Standard, Version 9.2*. 2018.
- [13] Object Management Group, *Business Process Model and Notation*, vol. 2.0. 2011.
- [14] A. Rachmanto and M. R. Fachrizal, “Perancangan Enterprise Architecture dengan Framework TOGAF ADM Pada Rumah Sakit Umum di Cimahi,” *J. Teknol. dan Inf.*, vol. 8, no. 2, 2018, doi: 10.34010/jati.v8i2.1037.
- [15] W. F. M. Haryono, R. Mulyana, and N. Ambarsari, “Perancangan Information System Architecture Menggunakan Togaf Adm Pada Fungsi Promosi (Studi Kasus: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat),” *Fountain Informatics J.*, vol. 5, no. 1, p. 1, 2019, doi: 10.21111/fij.v5i1.3312.
- [16] KemenPANRB, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah*. 2018.